

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kas merupakan alat tukar yang berfungsi sebagai dasar untuk mengukur dan menghitung semua barang, yang terdiri dari uang logam, mata uang, dan dana yang tersedia di rekening bank (Kieso, 2014). Kas memiliki peran yang krusial bagi organisasi swasta atau publik. Oleh karena itu, pengelolaan kas sangat penting bagi organisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah butir 19 pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Berdasarkan penjelasan ini, pengelolaan kas termasuk pengelolaan uang.

Pengelolaan kas adalah memiliki uang yang cukup pada tempat dan waktu yang tepat untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dengan cara yang

paling efektif (Storkey, 2003). Ide dasar pengelolaan kas adalah untuk memperlambat pengeluaran uang dan mempercepat penerimaan uang (Hasan, 1998). Hal ini dimaksudkan agar organisasi memiliki saldo kas dengan jumlah tertentu yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Pengelolaan kas, dalam hal ini pengelolaan kas daerah dimulai dari perencanaan kas, pengelolaan penerimaan kas, pengeluaran kas, pengelolaan kas kurang atau kelebihan kas serta pelaporan kas merupakan wewenang Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Bab IX tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan kas dan pengeluaran kas daerah. Dalam mengelola kas daerah Bendahara Umum Daerah menggunakan rekening kas umum daerah pada bank yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan disampaikan kepada DPRD.

Setiap organisasi termasuk pemerintah daerah harus menentukan jumlah kas yang harus disediakan agar aktivitas operasional sehari-hari dapat berjalan lancar. Salah satu masalah penting dalam pengelolaan kas adalah kelebihan kas dan kekurangan kas. Kas yang berlebihan akan mengakibatkan *idle cash* yang berarti hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan kas yang kurang

akan mengakibatkan kondisi kas yang tidak likuid artinya kas berada dalam kondisi yang tidak mampu melunasi kewajibannya.

Menyimpan uang kas dalam jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan beberapa risiko, termasuk inflasi dan biaya kesempatan. Selain itu, menyimpan uang tunai yang berlebihan menunjukkan tidak adanya pengelolaan keuangan yang baik (Ritongaudarmo dan Basri 2008).

Untuk menghindari kelebihan kas dan kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah harus menetapkan jumlah kas yang optimal. Hal ini akan menjadi sumber informasi kepada pemerintah daerah tentang penggunaan saldo kas daerah secara efisien serta memastikan pemerintah daerah mampu mengendalikan posisi kas agar tetap optimal.

Posisi kas optimal dapat diperoleh dengan mengendalikan arus kas masuk dan arus kas keluar secara efektif. Untuk menentukan jumlah kas yang optimal, dapat digunakan kerangka kerja anggaran kas dengan menentukan persediaan kas optimal. Berdasarkan model Miller-Orr dapat dilakukan analisis tentang pemasukan kas dan pengeluaran kas agar dapat dikelola secara efisien dan dikendalikan untuk mengoptimalkan kas daerah.

Dari penerapan model Miller-Orr maka dapat diketahui batasan-batasan pengendalian kas, yaitu batas bawah, titik balik optimal, dan batas atas kas yang tidak boleh dilewati sehingga Bendahara Umum Daerah mengetahui berapa saldo kas yang dapat dipertahankan. Dengan menerapkan model Miller-Orr, Bendahara Umum Daerah dapat menentukan alternatif penggunaan kelebihan kas, misalnya

dialokasikan dalam bentuk surat berharga seperti sertifikat deposito, sehingga dapat memperoleh tambahan pendapatan daerah berupa pendapatan bunga.

Apabila terjadi kekurangan kas, maka Bendahara Umum Daerah dapat menentukan alternatif pemenuhan kekurangan kas yang paling menguntungkan, misalnya dengan mencairkan surat berharga yang dimiliki. Dengan adanya penerapan persediaan kas optimal berdasarkan model Miller-Orr, maka penggunaan kas dapat lebih efektif dan efisien.

Penelitian mengenai saldo kas pemerintah di Indonesia telah digarap oleh beberapa peneliti. Ritonga dkk (2012) pada hasil penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah daerah mengalami kelebihan jumlah aset lancar yang menyebabkan rasio lancar yang tinggi.

Hapsari (2015) juga melakukan penelitian mengenai saldo kas optimal pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 dan 2014. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa saldo kas optimal Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih rendah dari saldo kas riil.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis pengelolaan kas optimal pada institusi pemerintah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sebagai objek penulisan. Pemerintah daerah merupakan salah satu subjek yang menguasai/memiliki uang negara. Penulis juga ingin meninjau kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan kas.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengambil judul “ANALISIS PENGELOLAAN KAS OPTIMAL DENGAN METODE MILLER-ORR PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan perumusan masalah pada karya tulis tugas akhir (KTTA) ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo?
2. Berapa saldo kas yang optimal pada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2018-2020 jika diukur menggunakan metode Miller-Orr?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pengelolaan kas?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam menyusun karya tulis tugas akhir (KTTA) ini, penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui implementasi pengelolaan kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
2. Mengetahui jumlah saldo kas yang optimal pada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2018-2020 jika diukur menggunakan metode Miller-Orr.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pengelolaan kas.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dari penulisan KTTA ini adalah menganalisis terkait pengelolaan kas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo. Penelitian ini akan dikhususkan untuk membahas pengelolaan kas, pengelolaan rekening, dan optimalisasi kas. Penelitian ini akan melibatkan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan pegawai di kantor BPKPAD Kabupaten Karo sebagai partisipan yang akan diwawancarai.

Analisis saldo kas optimal dilakukan dengan menggunakan metode Miller dan Orr. Model tersebut dinilai lebih baik karena fleksibel terhadap pergerakan necara dan arus kas (Wang 2014). Sementara itu, saldo kas yang akan dianalisis ialah saldo kas 3 tahun, yaitu saldo kas tahun 2018 s.d. 2020 untuk memberikan gambaran terkini terkait objek penulisan.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Karo

Memberikan saran dan masukan bagi instansi pemerintah serta menjadi referensi pengelolaan kas pada pemerintah Kabupaten Karo sehingga diharapkan pengelolaan kas daerah dapat optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

2. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

Sebagai literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mendatang dan menambah bahan bacaan pada perpustakaan PKN STAN khususnya mengenai pengelolaan kas optimal.

1.6 Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI KARYA TULIS
TUGAS AKHIR

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1.5 Manfaat Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Kas

2.1.2 Konsep Pengelolaan Kas

2.1.3 Konsep Saldo Kas Optimal